

SAAT INI MASIH TERUS BERPROSES

Fokus Tangani 3 Sektor, Pemda DIY Bentuk OPD Baru

YOGYA (KR) - Rencana pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru di lingkungan Pemda DIY, hingga kini masih terus dilakukan. Salah satu tahapan yang saat ini sedang dilakukan adalah proses pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) oleh panitia khusus DPRD DIY. Rencana pembentukan OPD tersebut muncul dilatarbelakangi adanya visi misi Gubernur tentang reformasi birokrasi kalurahan dan pembangunan wilayah selatan.

"Saat ini pansus DPRD DIY sedang membahas rincian detail yang nantinya menjadi tugas pokok dan fungsi dari OPD baru tersebut. Meskipun gambaran umumnya sudah siap, tetapi ke depannya harus jelas fungsi dan ketugasan dari lembaga baru tersebut. Karena tiga fungsi itu bukan jadi satu di dinas yang sedang didesain. Pertama, mendukung catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan reformasi kalurahan. Jadi OPD itu yang akan mengawal tiga sektor tersebut," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono di Yogyakarta, Minggu (5/5).

Menurut Beny, OPD yang saat ini sedang dipersiapkan merupakan pecahan dari Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yang nantinya fokus pada urusan tiga sektor yaitu pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan reformasi kalurahan. Karena selama ini layanan pencatatan sipil di DIY masih melekat pada Biro Tapem. Padahal di daerah lain urusan pencatatan sipil sudah berbentuk dinas sendiri. Hal itu terjadi karena kebutuhan layanan berkaitan dengan hal itu tidak sebesar atau sebanyak daerah lain.

"Sebetulnya dengan bantuan teknologi dan hubungan antar pemer-

intahannya cair provinsi yang sifatnya koordinatif cukup. Kendati demikian kami bertekad untuk tingkatkan jadi satu dinas. Tentunya fungsi catatan sipil harus tetap ada," ungkapnya.

Sebelumnya Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menjelaskan, meski OPD baru rintisan pengajuannya disetujui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tapi pihaknya memastikan bahwa Biro Tata Pemerintahan (Tapem) akan tetap ada. Mengingat selama ini Biro Tapem membawahi pemerintahan umum, pemerintahan kalurahan dan kapanewon/kemantren, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Jadi meskipun pihaknya telah mengajukan permohonan pembentukan OPD ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tapi masih harus menunggu keputusan dan tinjauan dari Kemendagri.

"Saat ini baru diajukan, belum tahu nanti keputusannya bagaimana. Tergantung keputusan Kemendagri," ujarnya. **(Ria)-d**

PKB Kota Yogyakarta Buka Pendaftaran Bacalon Walikota



KR-Devid Permana

Solihul Hadi (dua dari kanan) menyampaikan keterangan pers.

YOGYA (KR) - PKB Kota Yogyakarta membuka pendaftaran Bacalon Walikota dan Bacalon Wakil Walikota Yogyakarta 2024. Sejumlah tokoh telah mendaftar seperti Hanum Salsabiela Rais, Muhammad Yazid Afandi, Heroe Poerwadi, Ricco Survival Yubaidi, Haryawan Emir Nuswantoro, Amin Purnama, Ariyanto dan Mariana Ulifah.

Ketua DPC PKB Kota Yogyakarta, Solihul Hadi menuturkan, sesuai arahan Ketum PKB Gus Muhaimin Iskandar, bahwa dalam kontestasi Pilkada 2024 di Kota Yogyakarta, PKB Kota Yogyakarta membuka pendaftaran Bacalon Walikota dan Bacalon Wakil Walikota Yogyakarta 2024.

"Awalnya saya pesimis, tapi ternyata banyak yang mendaftar melalui PKB Kota Yogya, yang mendaftar juga bukan orang-orang sembarang, tapi mereka yang memang memiliki kompetensi dan jumlah massa yang banyak di Kota Yogya," kata Solihul kepada wartawan saat jumpa pers di Hotel Grand Senyum Yogyakarta, Jumat (3/5).

Turut mendampingi Wakil Ketua Dewan Syuro, Muhyat dan Calon

Anggota DPRD Kota Yogyakarta terpilih Eko Djoko Widiyatno.

Menurut Solihul, PKB Kota Yogyakarta hari ini mengusung semangat transformasi politik dengan mereposisi kondisi partai, sehingga PKB Kota Yogyakarta menjadi partai yang terbuka bagi semua pihak. Bahkan pada saat kontestasi Pileg Februari 2024 lalu, yang mendaftar sebagai caleg ada dua orang yang non-muslim bergabung dan berjuang bersama PKB Kota Yogyakarta.

Melihat konstelasi perpolitikan di Kota Yogya hari ini, termasuk di dalamnya terkait Pilkada, PKB Kota Yogyakarta terbukti mampu bersaing dengan partai lain. Kemudian dengan banyaknya yang mendaftar pilkada, menandakan bahwa PKB Kota Yogya bukan hanya sekadar partai pendukung saja, namun juga partai pengusung Bacalon Walikota dan Bacalon Wakil Walikota Yogyakarta 2024.

"Kekuatan utama kami adalah berbasis massa, yaitu massa kultural atau warga Nahdliyyin," pungkasnya.

(Dev)-d

21 HARI SEBELUM DILANTIK

Anggota Dewan Agar Serahkan LHKPN

YOGYA (KR) - Jogja Corruption Watch (JCW) mengingatkan kepada para calon anggota dewan terpilih periode 2024 - 2029 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang ada DIY untuk senantiasa patuh dan tertib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terhutang sejak 21 hari sebelum pelantikan.

"Kecuali anggota dewan terpilih yang belum ditetapkan oleh KPU karena masih menunggu putusan gugatan atau perselisihan hasil pemilihan umum atau PPHU di Mahkamah Konstitusi. Seperti di Kabupaten Kulonprogo yang belum menetapkan para anggota DPRD terpilih Kabupaten Kulonprogo periode 2024 - 2029 karena masih menunggu putusan MK", tutur

Aktivis JCW, Baharuddin Kamba, Minggu (5/5).

Kamba mengatakan, apabila ada anggota dewan terpilih yang ditetapkan oleh KPU, namun belum melaporkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka akan terancam tidak dilantik. Hal ini diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon dalam Pemilu. Salah satu isi dari PKPU tersebut adalah mewajibkan para calon legislatif terpilih baik itu dari DPR, DPD, DPRD provinsi/ kabupaten/kota, untuk mewajibkan mereka melaporkan LHKPN ke instansi yang berwenang dalam hal pelaporan harta kekayaan, dalam hal ini adalah

KPK. "Karena penting, para anggota dewan terpilih dan telah ditetapkan oleh KPU wajib melaporkan LHKPN-nya. Sebagai pejabat publik seperti anggota dewan wajib melaporkan harta kekayaannya secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik", kata Kamba.

Untuk itu JCW mengingatkan kepada para legislator terpilih untuk tertib dan patuh melaporkan LHKPN-nya. "Laporkan apa adanya, tidak perlu ada yang disembunyikan dan ditutupi," lanjutnya. Kamba menambahkan, JCW mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi LHKPN tersebut. Apabila dirasa ada yang tidak wajar, maka masyarakat dapat melaporkannya ke KPK dengan disertai bukti-bukti terkait. **(*-1)-d**

Sekolah Khusus Fajar Nugraha Memperhatikan Autis Menua



KR-Istimewa

Pemotongan tumpeng menandai peringatan ulang tahun Sekolah Khusus Autis Fajar Nugraha.

YOGYA (KR) - Sekolah Khusus Autis Fajar Nugraha meresmikan Fajar Nugraha Boarding School, di Perum Pilahan Permai, Rejowinangun Kotagede, Sabtu (4/5). Ketua Yayasan Fajar Nugraha, Muhammad Agus Hanafi SH mengatakan, boarding school ini diharapkan dapat mengembangkan potensi penyandang autis, sehingga memiliki keterampilan yang dapat menopang hidup di masa tuanya. Minimalnya bisa membina diri dan dapat bersosialisasi dengan baik di masyarakat.

"Sebagai tempat membangun harapan, semoga sekolah ini mampu mengembangkan potensi penyandang autis, sehingga mempunyai keterampilan yang mampu menopang kehidupan di masa tuanya setidaknya

nya mampu membina diri dan bersosialisasi di masyarakat dengan baik," katanya.

Acara tersebut dihadiri para orangtua siswa dan warga sekitar. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh koordinator pengawas SLB Disdikpora DIY Sardiyana SPd MPd, serta dihadiri Direktur Fajar Nugraha, pengawas SLB, Kadeplb UNY, Kepala BAN SN DIY dan kepala puskesmas setempat.

Acara dimeriahkan pameran hasil karya siswa di stand market day. Peresmian boarding school ini, juga diadakan pemotongan tumpeng karena bertepatan dengan ulang tahun ke-27 Fajar Nugraha serta peluncuran buku dengan judul 'Dengan Siapa Penyandang Autis Menua?' **(*)-d**

KOMITMEN KOMUNITAS NASUHA

Bantu Orang yang Memiliki Utang Riba

YOGYA (KR) - Komunitas Nasuha Yogyakarta kembali menggelar kegiatan 'Temu Sahabat Nasuha (TSN)' yang dilaksanakan di Ayaartta Hotel Malioboro Yogyakarta, Minggu (5/5). Miftah Farid, Ketua Korda Nasuha DIY- Jateng menuturkan, Nasuha merupakan komunitas yang bergerak dalam kegiatan dakwah untuk meningkatkan ketakwaan bagi anggota dan masyarakat agar mendapat Ridho Allah SWT.

"TSN merupakan salah satu kegiatan di Nasuha, dimana Nasuha berkomitmen untuk membantu orang yang memiliki amanah utang riba di lembaga, perorangan maupun lainnya", tutur Farid (5/5). "Kegiatan TSN ini, merupakan pembelajaran yang memberikan materi mengenai dasar-dasar dan teknis cara penyelesaian utang riba. Jadi akan kami jelaskan utang riba dosanya seperti apa, cara menghentikan utang riba, melakukan tobat dan sebagainya", lanjutnya.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 64 peserta

dari berbagai kalangan yang berasal dari Jawa Tengah, Yogyakarta dan ada beberapa peserta berasal dari Kalimantan Barat dan Surabaya. Para peserta rata-rata memiliki permasalahan dengan utang riba. Farid menambahkan, TSN merupakan pembelajaran tingkat pertama dan untuk tingkatan selanjutnya ada Langkah Bebas Utang (LBU) yang akan memperdalam lagi mengenai fundamental akidah dan teknik lunas utang. "Tingkat berikutnya ada solusi langit, dimana para peserta akan pengulangan mengenai fundamental akidah dan teknik lunas utang, serta ditambah dengan fiqh muamalah yang benar," imbuhnya.

Harapannya dengan kegiatan ini dapat mengajak semua orang yang memiliki amanah utang riba supaya bisa berhenti atau selesai secara permanen. Artinya, setelah kami bantu pembelajaran berhenti dari utang itu tidak akan mengulangi di kemudian hari", pungkasnya. **(*-1)-d**

KR RADIO
107.2 FM

MEDIA INFORMASI & HIBURAN

High Light KR Radio

- ➔ Sewarna
- ➔ Bening Hati
- ➔ Nuansa Gita
- ➔ Sang Legenda
- ➔ Sweet Memories
- ➔ Digoda
- ➔ Beatles Mania
- ➔ Soneta
- ➔ Pariwara
- ➔ Wayang Kulit & Cakruk

PEMASARAN :
Jl. Margo Utomo / P. Mangkubumi No. 40 -746
Jogjakarta Telp./Fax. : 0274 550 891

STUDIO :
Jl. Veteran No. 16 Wates Kulon Progo
D.I.Yogyakarta